



Waste to Energy Jangan Hanya Berhenti sebagai Wacana

TAJUK

Pemberian kuota 3.000 ton sampah dari Pemda DIY untuk Kota Jogja di TPA Piyungan menjadi alarm terakhir. Sekda DIY menegaskan dengan gamblang bahwa kuota ini adalah kesempatan terakhir. Setelah itu, Piyungan tidak bisa lagi menampung sampah dari Kota Jogja. Pernyataan ini bukan sekadar peringatan administratif, melainkan sinyal darurat bagi tata kelola sampah perkotaan yang selama ini tersendat-sendat.

Kota Jogja selama ini masih bergantung pada Piyungan. Padahal peringatan tentang keterbatasan daya tampung TPA sudah disampaikan sejak lama. Program-program pengolahan sampah, baik melalui Peraturan Wali Kota tentang pengurangan kantong plastik maupun gerakan *Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas Jos)*, memang berjalan. Namun, butuh upaya tambahan untuk mengatasi besarnya timbulan sampah harian, terutama di depo-

depo yang kembali penuh. Masalah sampah di Kota Jogja sebetulnya bukan hanya urusan rumah tangga. Sektor pariwisata, yang menjadi nadi ekonomi kota, juga menyumbang volume besar. Oleh karena itu, menekankan pemilahan sampah di tingkat warga saja tidak cukup. Pemkot Jogja harus berani menegakkan aturan khusus bagi pelaku wisata meliputi hotel, restoran, kafe, dan tempat hiburan. Sampah dari sektor pariwisata tidak boleh

lagi ikut mengalir dalam truk-truk pengangkut sampah warga. Harus ada aturan tegas, mekanisme pengolahan mandiri, dan sanksi jelas jika pelaku usaha abai. Alternatif kerja sama dengan wilayah sekitar yang memiliki lahan pengolahan juga perlu dijabaki lebih serius. Selama ini, hambatan terbesar adalah penolakan warga. Di titik ini, peran Pemda DIY sangat penting sebagai penengah. Pemda DIY harusnya bisa membantu

menjembatani, sehingga lahir kesepakatan bersama yang adil agar Kota Jogja mendapat solusi pembuangan sampah, sementara warga yang wilayahnya dipakai mendapat jaminan kompensasi atau manfaat setara. Selain itu, wacana pembangunan fasilitas *waste to energy* atau pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) perlu dukungan penuh. Pemerintah Pusat sudah menetapkan DIY sebagai

lokasi awal proyek nasional tersebut. Momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik. Proses perencanaan, perizinan, hingga kemitraan harus dikejar agar fasilitas itu benar-benar terwujud. Kota Jogja membutuhkan solusi jangka panjang. Tahun ini harus menjadi titik balik. Pemkot Jogja harus memastikan pengelolaan sampah perkotaan secara nyata, baik dari rumah tangga maupun dari sektor pariwisata. Kuota terakhir di Piyungan harus dibaca sebagai batas waktu.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005